

# KEBIJAKAN

# PUBLIK

**Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si.**



# LITERATUR



1. Handbook Analisis Kebijakan Publik (Teori, Politik dan Metode) – Frank Fischer, Gerald J. Miller & Mara S. Sidney, 2015.
2. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan – Wayne Parsons, 2008.
3. Pengantar Analisis Kebijakan Publik – William N. Dunn, 2005.
4. Analisis Kebijakan – Riant Nugroho, 2018.
5. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis – Dwiyanto Indiahono, 2017.

# LITERATUR

6. Analisis Kebijakan – Solichin Abdul Wahab, 2016.
7. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik – Joko Widodo, 2015.
8. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus) – Budi Winarno, 2012.
9. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi – Subarsono, 2006.

# DESKRIPSI SINGKAT & CAPAIAN DEMBELAJARAN MATA KULIAH

Mata kuliah Kebijakan Publik **mempelajari tentang** berbagai aspek yang terkait kebijakan publik dan berbagai teori dan pendekatannya, serta berbagai fenomena kebijakan publik.

Setelah menyelesaikan mata kuliah Kebijakan Publik pada akhir semester, mahasiswa **mampu menghubungkan berbagai teori dan pendekatan kebijakan publik dengan realita kebijakan publik dan mampu menjelaskan berbagai fenomena kebijakan publik dan menghubungkannya dengan berbagai disiplin ilmu.**



# UNTUK ADA MEMPELAJARI KEBIJAKAN ???



Sebagai suatu studi, KEBIJAKAN adalah ilmu yang mempelajari tindakan kelompok / pemerintah dalam kehidupan kenegaraan ; sebagai pemenuhan kewajiban dalam merespon masalah atau kebutuhan warga negara.

Maka, KEBIJAKAN berorientasi untuk mengatur kehidupan bersama menuju manfaat.

# APA YANG DIMAKSUD DENGAN

**KEBIJAKAN**

ke-

-an

Bijak



# ARTI KATA “KEBIJAKAN”

- Kebijakan / *policy* secara **etimologis** berasal dari kata :
  - 1) “*Polis*” (Yunani) yang berarti negara-kota.
  - 2) “*Politia*” (Latin) yang berarti negara.
  - 3) “*Policie*” (Inggris lama) yang berarti urusan pemerintah.

# PENGERTIAN KEBIJAKAN

## \* SECARA KONSEPTUAL



### KEBIJAKAN

### KEBIJAKSANAAN

- Berdasarkan konsep filsafat, **KEBIJAKAN** diterminologikan dengan **WISDOM** yang berarti “Cinta Kebenaran”.
- Konsep **KEBIJAKSANAAN** diartikan sebagai suatu “Pernyataan Kehendak”.
- Dlm bahasa politik, **KEBIJAKSANAAN** diistilahkan sebagai *Statement of Intens* atau “Perumusan Keinginan”.

- Maka sebagai suatu studi, **KEBIJAKAN** harus diartikan sebagai :

“pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur **pengaturan** dan atau **paksaan**, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki”

**BAGAIMANA MELAKUKANNYA ???**



# PELAKSANAAN KEBIJAKAN

## MEMERLUKAN :

**KEKUASAAN**

Untuk mempengaruhi kelompok sasaran agar patuh / taat

**WEWENANG**

Untuk menciptakan kesediaan kelompok sasaran agar membantu & memberi dukungan

Untuk membina kerjasama & meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak.

**PERNYATAAN KEHENDAK**

**OTORITAS**

**PENGATURAN**

**TUJUAN**

**ASPEK-ASPEK  
KEBIJAKAN**



# PENGERTIAN KEBIJAKAN

## \* MENURUT PARA PAKAR

Thomas  
R. Dye

Pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

David  
Easton

Kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.

Laswell  
& Kaplan

Program yang diproyeksikan terkait dengan tujuan, nilai dan praktek.

Hugh  
Heglo

Tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

**James  
Anderson**

Serangkaian tindakan yang bertujuan, yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam rangka untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

**William  
Jenkins**

Suatu rangkaian keputusan yang saling berhubungan yang diambil oleh aktor politik atau sejumlah aktor yang memperhatikan tujuan-tujuan tertentu dan diterima secara bersama dengan situasi spesifik dimana keputusan itu secara prinsipal harus berada diantara kekuasaan para aktor itu untuk dapat diterima.

# APA YANG DIMAKSUD DENGAN

**PUBLIK**

```
graph TD; PUBLIK --> pemerintah; PUBLIK --> masyarakat; PUBLIK --> umum; pemerintah --- DIMENSI_SUBYEK; masyarakat --- DIMENSI_OBYEK; umum --- DIMENSI_LINGKUNGAN;
```

pemerintah

**DIMENSI  
SUBYEK**

masyarakat

**DIMENSI  
OBYEK**

umum

**DIMENSI  
LINGKUNGAN**

# CIRI-CIRI KEBIJAKAN



# UNSUR-UNSUR **KEBIJAKAN**



# SIFAT KEBIJAKAN PUBLIK

1  
KOMPLEKS

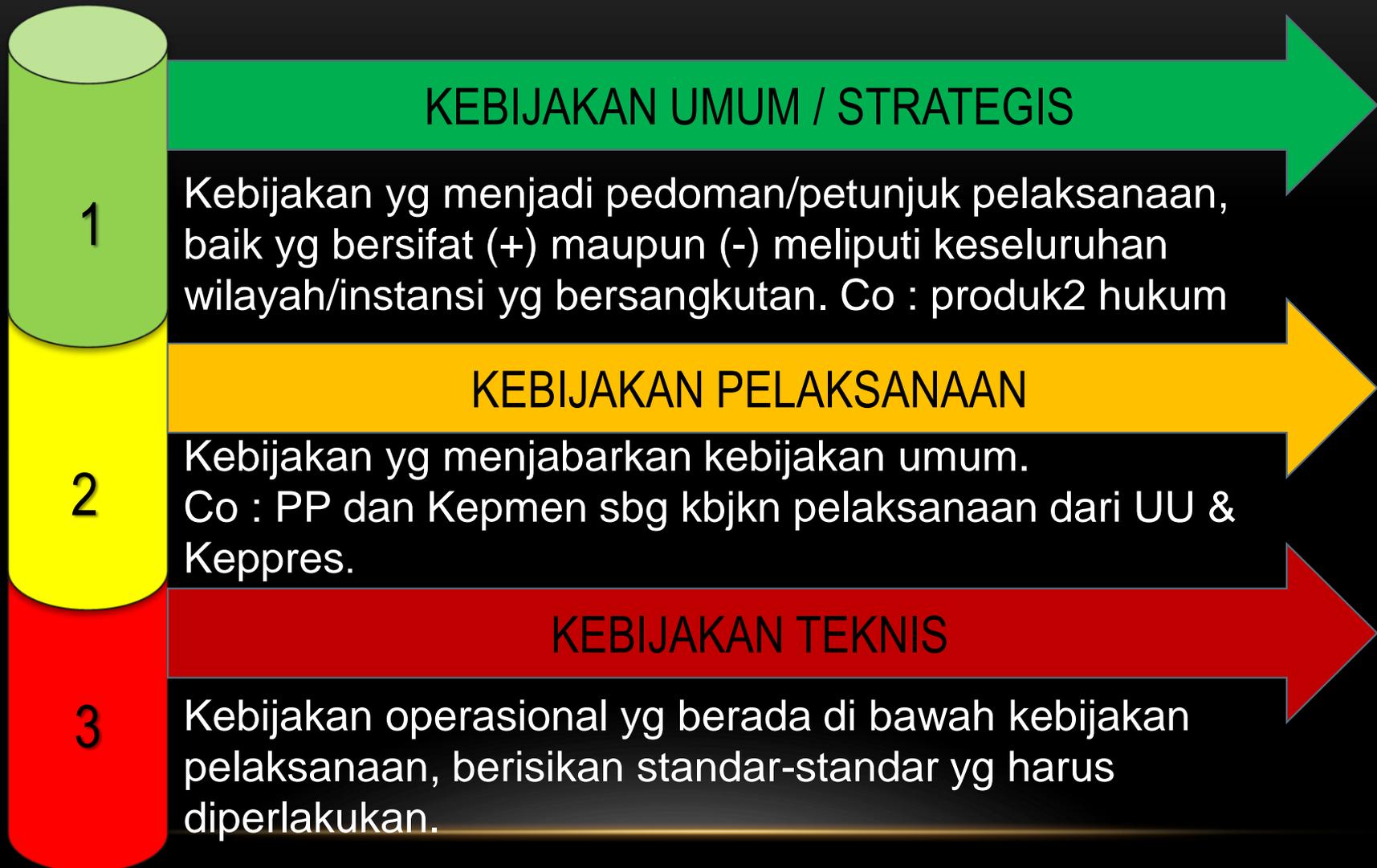
2  
DINAMIS

**KEBIJAKAN PUBLIK**  
*itu sifatnya...*

4  
KONTINUM

3  
PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN

# STRATA KEBIJAKAN



# HIRARKI KEBIJAKAN PUBLIK di INDONESIA

Berdasarkan UU RI  
No.12 Tahun 2011  
tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-  
undangan

1 UUD 1945

2 Ketetapan MPR

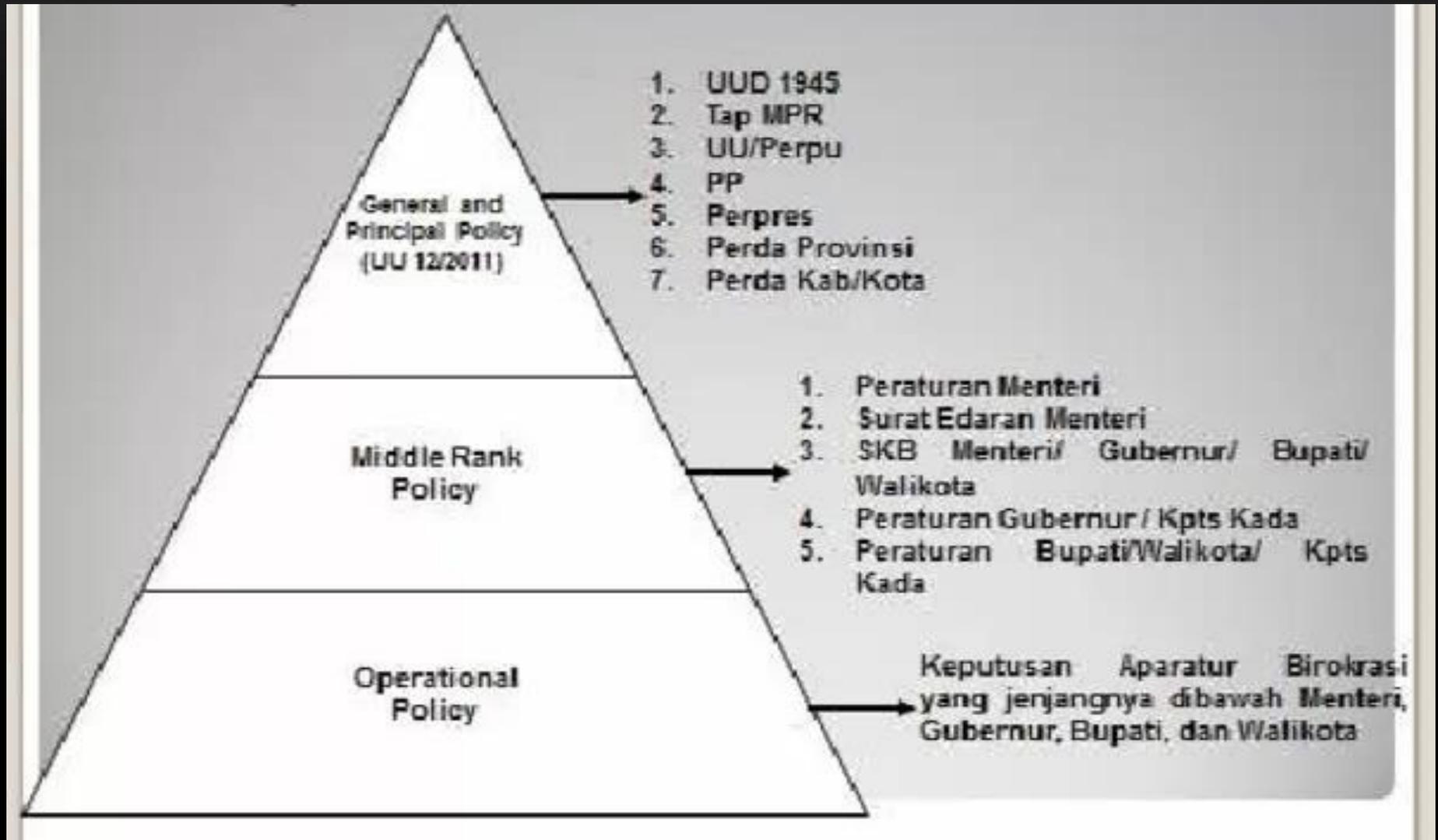
3 UU / Perppu (Peraturan Perundang-undangan)

4 PP (Peraturan Pemerintah)

5 Perpres (Peraturan Presiden)

6 Perda (Peraturan Daerah Provinsi, Kab/Kota)

# HIRARKI KEBIJAKAN



# TUGAS 1

Carilah 1 kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada jangka waktu tahun 2021-2023. Unduh secara lengkap dan pelajari substansinya. Jika memilih Perda, **WAJIB** Perda pada lingkup max Prov. Kaltim saja.

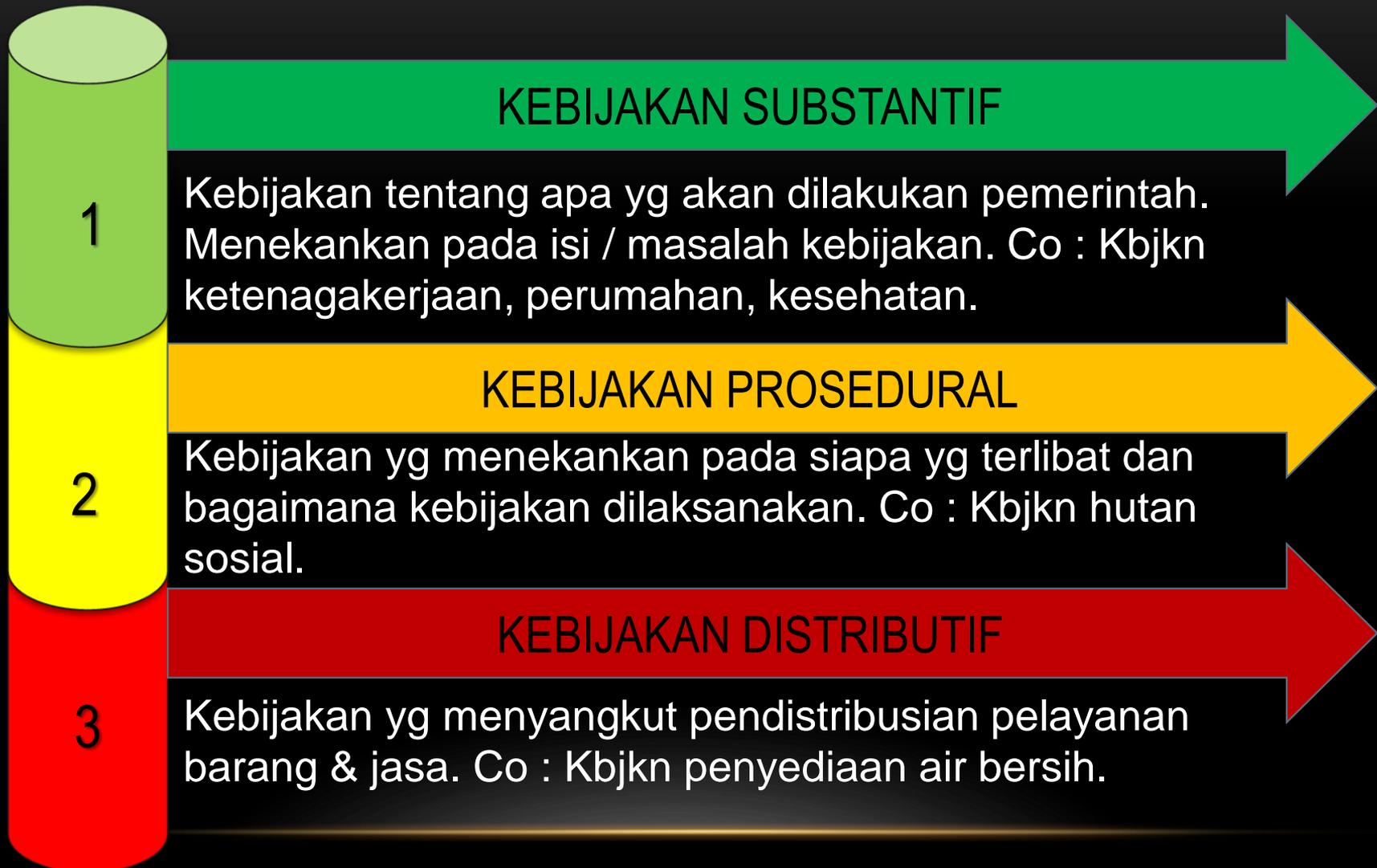
Buatkan bahan presentasinya berupa 1-2 slide Powerpoint yang menampilkan:

- Nama & NIM,
- Nama Kebijakan Pemerintah,
- Intisari dari substansi kebijakannya.

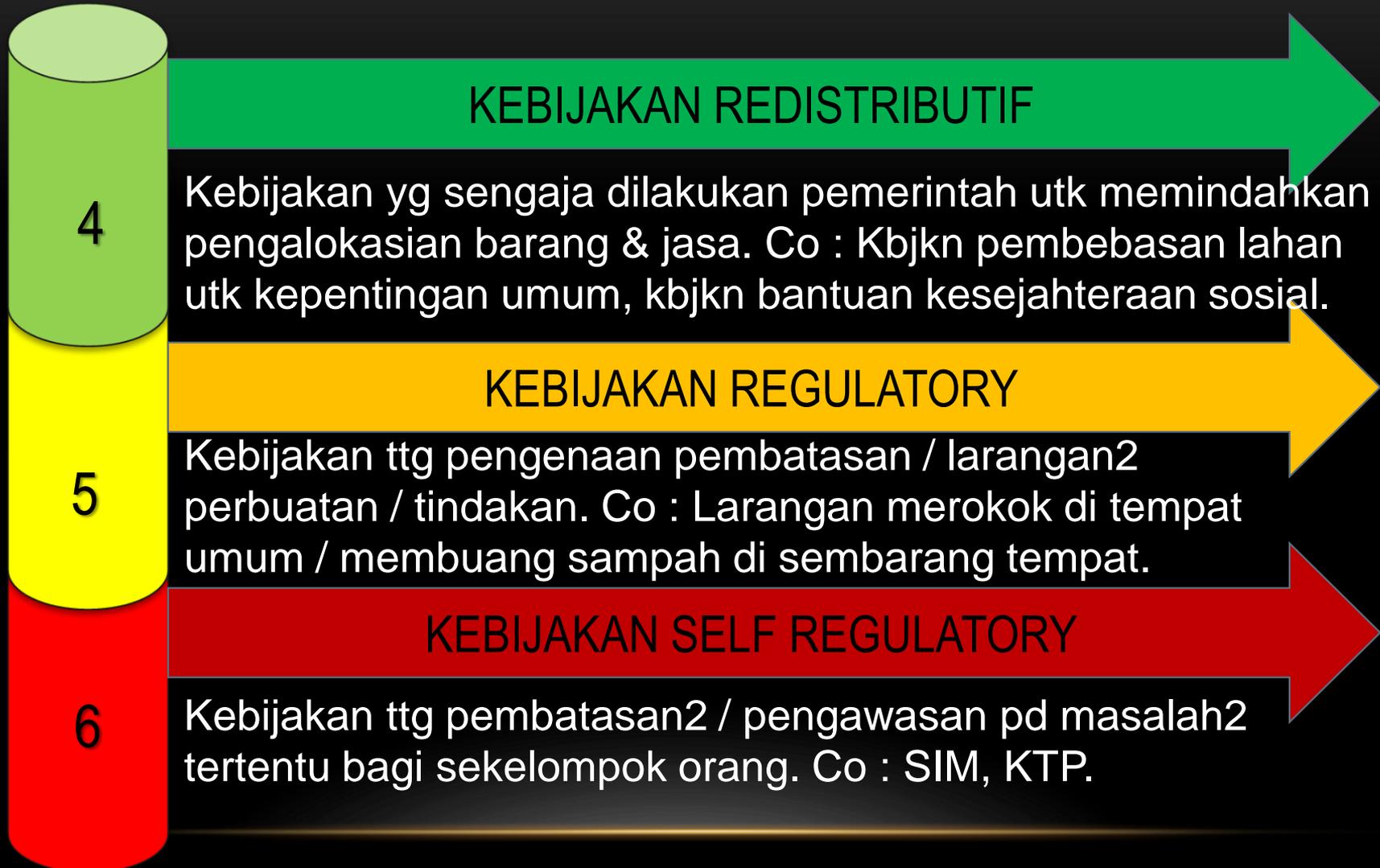
Kirim file PPT ke email [dr.fajarapr99@yahoo.com](mailto:dr.fajarapr99@yahoo.com) paling lambat Sabtu, 2 September 2023 (pengumpulan tugas diperhitungkan sebagai 1x kehadiran kuliah).

Dipresentasikan dalam pertemuan kuliah pada Senin, 4 September 2023

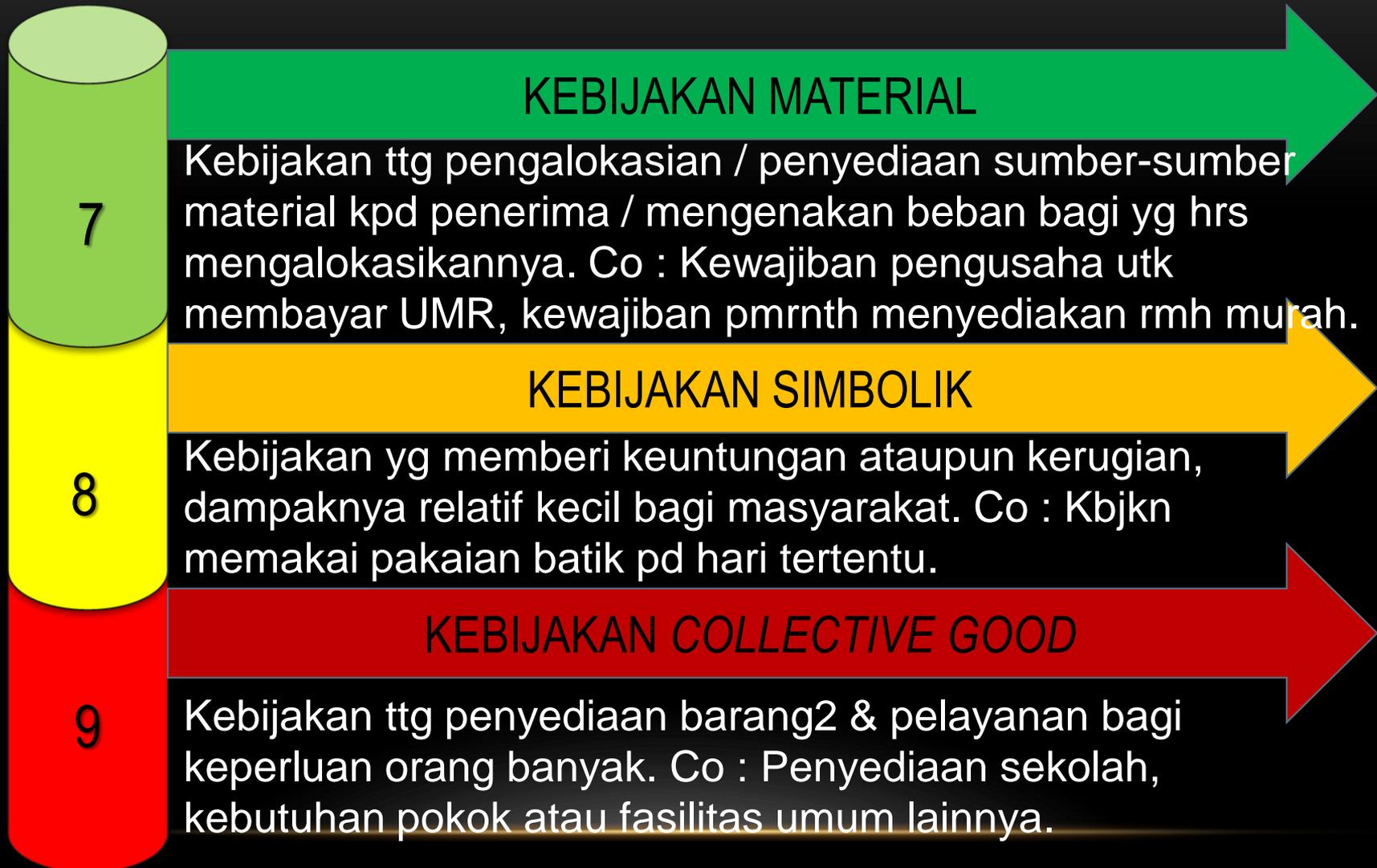
# TIPOLOGI KEBIJAKAN



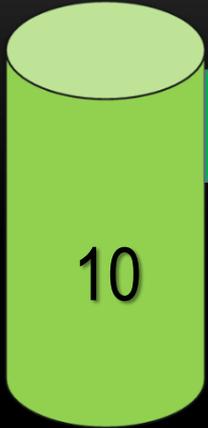
# LANJUTAN... TIPOLOGI KEBIJAKAN



# LANJUTAN... TIPOLOGI KEBIJAKAN



# LANJUTAN... TIPOLOGI KEBIJAKAN



## KEBIJAKAN *PRIVATE GOOD*

Kebijakan ttg penyediaan barang2 & pelayanan bagi keperluan perseorangan / privat yg tersedia di pasaran tetapi yg membutuhkan harus membayar biaya tertentu.  
Co : Pemakaian jalan tol, penyambungan telepon, listrik, dll.

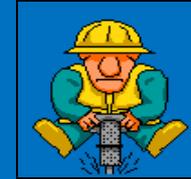
# MACAM KEBIJAKAN



***Originated  
Policy***



***Implied  
Policy***



***Emergency  
Policy***



***Appeal  
Policy***



***External  
Imposed Policy***

**Originated  
Policy**

Kebijakan yg diciptakan / dirumuskan oleh pucuk pimpinan organisasi

**Implied  
Policy**

Kbjkn yg tdk dirumuskan oleh pimpinan pucuk, tidak memiliki sanksi formal, hanya sekedar pedoman dalam pengambilan keputusan

**Emergency  
Policy**

Kbjkn yg dilakukan pucuk pimpinan secara darurat utk mengatasi masalah yg insidental

**Appeal  
Policy**

Kbjkn pimpinan tingkat bawah sesuai bidangnya, yg berdasarkan atas arahan pimpinan pucuk

**External  
Imposed  
Policy**

Kbjkn yg disesuaikan dgn pihak luar yang mempengaruhinya

# TUGAS 2

Buatkan resume ttg kebijakan itu terutama mengapa Anda mengkategorikannya dalam tipe / macam kebijakan tersebut.

Tugas harus memuat:

- Nama & NIM,
- Nama Kebijakan Pemerintah secara jelas,
- Intisari dari kebijakannya,
- Argumen pengkategorian kebijakan dalam tipe / macam yg dipilih.

Carilah 1 kebijakan pemerintah yang dapat Anda kategorikan sebagai tipe / macam kebijakan diantara 10 tipologi kebijakan atau diantara 5 macam kebijakan sebagaimana tertera pd slide bahan matkul.

Kirim file tugas dlm Google Drive Kelas, paling lambat Sabtu, 23 September 2023 pukul 24.00 WITA. Beri nama file tugas masing-masing dengan pola:  
TGS2\_KP\_KIsA/B\_NIM\_Nama Mhswa

**TUGAS BERSIFAT SEBAGAI  
PENGANTI UTS.**

# APA PERSAMAAN

**KEBIJAKAN**

**HUKUM**

1. Konsep Dasar

2. Berangkat dari Realita

3. Berakhir pada Penetapan Solusi

**KEADILAN & LEGALITAS**

**PEMBENTUKAN HUKUM & PERUMUSAN KEBIJAKAN**

**SOLUSI ATAS REALITA DI MASYARAKAT**





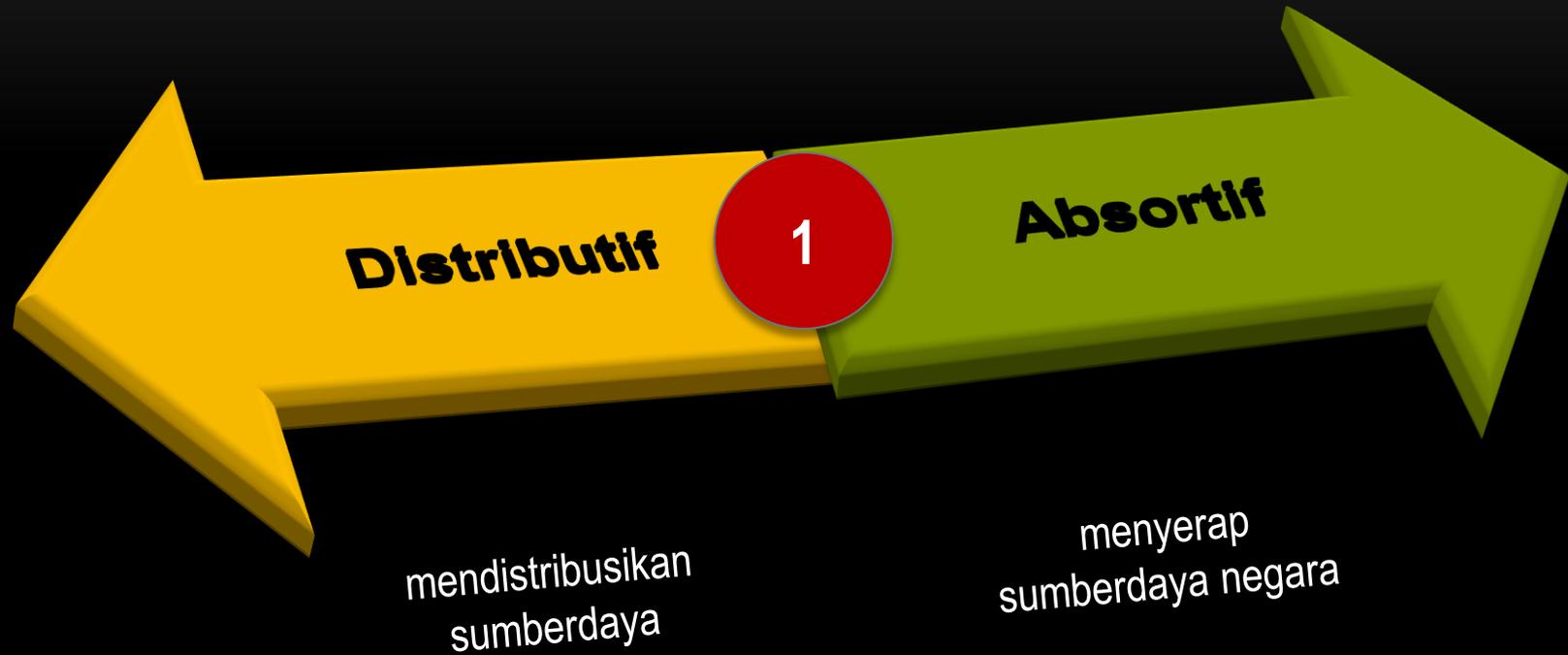
# APA PERBEDAAN

**KEBIJAKAN**

**HUKUM**

	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>HUKUM</b>
<b>Hakekatnya</b>	Mengandung proses politik yang kompleks.	Alat / sarana ketertiban negara
<b>Tujuannya</b>	Solusi untuk memecahkan masalah publik.	Masyarakat berkeadilan dan berkesejahteraan sosial
<b>Bentuknya</b>	Keputusan yang diambil dengan kepastian ataupun ketidakpastian.	Peraturan yang memaksa dan adanya sanksi bagi pelanggar
<b>Orientasinya</b>	Kepentingan publik	Kekuatan dan kemapanan dari kandungannya.

# TUJUAN KEBIJAKAN



# TUJUAN KEBIJAKAN



# TUJUAN KEBIJAKAN

**Dinamisasi**

3

**Stabilisasi**

menggerakkan  
sumberdaya nasional  
untuk mencapai  
kemajuan yang  
dikehendaki

memperlambat  
dinamika yang  
terlalu cepat  
untuk mempertahankan  
sistem

# TUJUAN KEBIJAKAN



# VARIABEL YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK

**kebijakan**

dapat dipengaruhi oleh :



**WHY**  
?

# DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK



# DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK



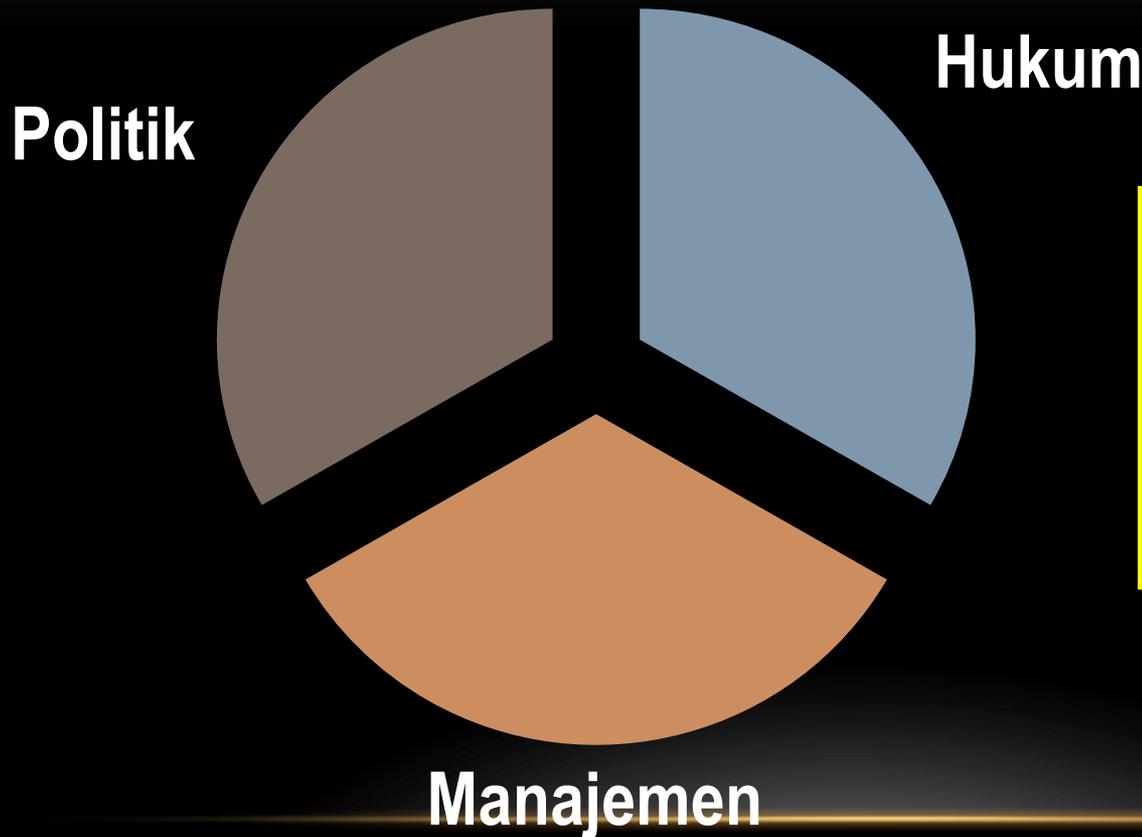
**Kebijakan Publik**

**Kebijakan :**

- 1) “Hidup”,
- 2) Memiliki kemampuan memperbaiki dirinya sendiri pada saat terjadi masalah

Kebijakan Publik merupakan HASIL SINTESA dari Dinamika Politik, Ekonomi, Sosial dan Kultural dimana kebijakan itu sendiri berada.

# DIMENSI PEMBENTUK KEBIJAKAN PUBLIK



Setiap negara pada dasarnya menghadapi masalah yang sama, yang berbeda adalah respon negara thd masalah tersebut.



# PELAKU KEBIJAKAN PUBLIK

**1**

## **Lembaga Legislatif**

**KINERJANYA TERKONSENTRASI PADA PEMBUATAN HUKUM & PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM SISTEM POLITIK**

**2**

## **Lembaga Eksekutif**

**OTORITAS YG DIEMBAN & DIMILIKINYA MEMUNGKINKAN UTK BERKEDUDUKAN SBG PEMBUAT KEBIJAKAN TAKTIS & TEKNIS KRN KEMAMPUAN LEGISLATIF TERBATAS UTK DPT MERUMUSKAN PROGRAM2 SECARA KOMPREHENSIF**

**3**

## **Agen2 Administratif**

**BAGIAN DARI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK KRN KEBERADAAN BADAN ADM. MUTLAK KRN POLITIK & BERINTERAKSI DGN SISTEM YG LEBIH LUAS**

**4**

## **Partisipatoris Tidak Resmi**

**PARA KELOMPOK PEMERHATI YG IKUT SERTA SEBAGAI SUMBER INFORMASI UTK KEBIJAKAN PUBLIK SHG PUBLIK TDK SAJA HANYA SBG SUBYEK KEBIJAKAN**

**PARTISIPATORIS TDK RESMI**  
**itu...**

LSM

Ormas

Parpol

Organisasi  
Profesi

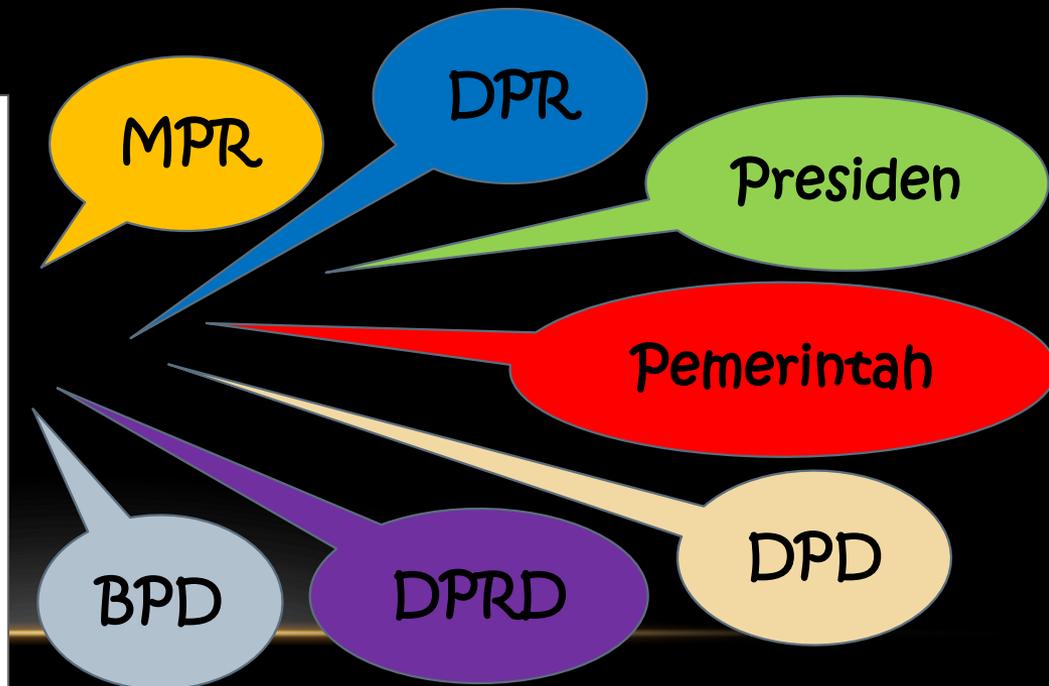
Media  
Komunikasi

Penduduk

# AKTOR KEBIJAKAN PUBLIK

## DI INDONESIA

**AKTOR** adalah lembaga-lembaga negara / pemerintah yang berwenang membuat perundang-undangan / kebijakan.



Yang disebut dengan **PEMERINTAH** adalah :

**PRESIDEN**  
sebagai  
Kepala  
Pemerintahan  
Pusat

Menteri

Dirjen

Lembaga  
Pemerintah  
Non  
Departemen

Kepala  
Desa

Pemda  
Provinsi,  
Kab/Kota

Badan-  
badan  
Negara  
Lainnya



Lokusnya dalam konteks sistem, proses & analisisnya



Lokusnya pada pengaruh berbagai faktor dalam pelaksanaan KP (kinerja kebijakan, interaksi dgn kelompok sasaran, pengaruh para aktor dan lingkungan).



Lokusnya dalam penilaian atas pelaksanaan & akibatnya.

## LOKUS

## Kebijakan Publik

# PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

1. Identifikasi dan Perumusan Masalah
2. Agenda Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat
3. Proses Perumusan Kebijakan Publik
4. Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan Publik
5. Pelaksanaan Kebijakan Publik
6. Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik

**TERIMA KASIH**



*Selamat menjalani UTS*